

Bulan :

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2 0 1 9



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Kompas	Sindo	Tempo
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		Indopos	Pos Kota	Warta Kota

Dewan Tolak Anggota Tim Gubernur Rangkap Jabatan

Gaji dan dana operasional TGUPP kembali diusulkan diambil dr anggaran Gubernur DKI Jakarta.

Francisco Rosarians

francisco@tempo.co.id

JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jakarta mempertanyakan posisi Achmad Haryadi yang menjadi anggota Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) sekaligus sebagai anggota dewan pengawas di tujuh rumah sakit umum daerah (RSUD). “Harus diperiksa kenapa bisa rangkap jabatan,” kata Wakil Ketua Komisi E DPRD Jakarta, Anggara Wicitra. “Karena bisa saja ada anggota TGUPP lain yang rangkap jabatan juga.”

Polemik rangkap jabatan anggota TGUPP ini muncul dalam rapat penyisiran Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) 2020 di Komisi E, pekan lalu. Pada saat itu, Dinas Kesehatan menjelaskan pengajuan anggaran senilai Rp 211 juta untuk gaji dan dana operasional lima anggota Dewan Pengawas RSUD di Jakarta.

Pada saat anggaran *diblejeti*, Komisi E menemukan nama Haryadi dalam daftar nama anggota dewan pengawas tujuh RSUD. Padahal, sebelumnya, nama Haryadi juga muncul dalam pembahasan anggaran TGUPP sebesar Rp 19,8 miliar. Anggaran tersebut akan digunakan untuk gaji dan dana operasional bagi 73 anggota TGUPP.

Anggota Komisi E, Merry Hotma, mengatakan, selain persoalan anggaran, rangkap jabatan akan mempersulit kinerja Haryadi.

Sebab, peran TGUPP di pemerintahan sangat penting, sehingga dapat menyita waktu dan pikiran. “Ini bisa tak *fair*. Ini *conflict of interest*,” kata dia.

Wakil Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Khofifah Any, mengatakan Dewan Pengawas RSUD memiliki lima anggota yang terdiri atas dua aparat sipil negara (ASN) dan tiga orang profesional. Dia mengklaim Haryadi mewakili masyarakat profesional. “Jadi, bukan ASN. Dia pensiunan dan profesional,” kata Khofifah. “Fungsinya mengawasi keuangan rumah sakit agar optimal.”

Hingga berita ini ditulis, Haryadi belum menanggapi pertanyaan *Tempo*. Namun pejabat pelaksana tugas Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DKI Jakarta, Sri Suharti, menilai tak ada konflik kepentingan dari rangkap jabatan Haryadi di TGUPP dan Dewan Pengawas RSUD. Sebab, di TGUPP, Haryadi juga berperan dalam pengawasan badan layanan umum daerah. “Dewan pengawas kan pengawas juga konteksnya. Dia bukan sebagai pengelola,” ujar Sri.

Ketua DPRD Jakarta Prasetyo Edi Marsudi juga mempersoalkan rangkap jabatan anggota TGUPP. Bahkan, dalam rapat Badan Anggaran, dia mengusulkan agar seluruh biaya gaji dan operasional anggota TGUPP tak dialokasikan dalam APBD 2020. Menurut dia, seluruh persoalan keuangan TGUPP harus berasal dari anggaran operasional Gubernur DKI Jakarta.

Prasetyo menambahkan, Sekretaris Daerah Jakarta harus memberikan penjelasan tentang kegiatan dan penggunaan dana TGUPP pada 2019. Sebab, selama ini anggota legislatif belum pernah mendapat laporan tentang kinerja detail tim gubernur itu, sementara

anggaran yang digunakan oleh tim tersebut berasal dari APBD. “TGUPP kalau mau hidup (tetap ada), pakai (dana) operasional gubernur,” kata Prasetyo. “Karena dulu (sebelum Anies) juga pakai dana operasional gubernur.”

● TAUFIQ SIDDIQ

Jabatan Ganda Dipermasalahkan

DEWAN Perwakilan Rakyat Daerah Jakarta mempersoalkan rangkap jabatan anggota Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP), Achmad Haryadi, di Dewan Pengawas Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD). Sejumlah anggota legislatif daerah menuding Haryadi melanggar sejumlah aturan.

Pendapatan:

- Anggaran untuk Dewan Pengawas RSUD Jakarta di KUA PPAS 2020: Rp 221 miliar
Perkiraan gaji per bulan anggota Dewan Pengawas: Rp 25-29 juta
- Anggaran TGUPP di KUA PPAS 2020: Rp 19,8 miliar
Perkiraan gaji per bulan anggota tim: belum diketahui mekanisme pembagiannya

Pembentukan TGUPP

■ Gubernur Joko Widodo

- » Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 83 Tahun 2013
- » Anggota TGUPP: aparat sipil negara di DKI Jakarta yang *non-job*
- » Jumlah anggota TGUPP: 7 orang
- » Asal dana: gaji ASN dan dana operasional gubernur
- » APBD: Rp 0

■ Gubernur Basuki Tjahaja Purnama

- » Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 163 Tahun 2015
- » Anggota TGUPP: kelompok profesional
- » Jumlah anggota TGUPP: 9 orang
- » Asal dana: dana operasional gubernur
- » APBD: Rp 0

■ Gubernur Anies Baswedan

- » Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 16 Tahun 2019
- » Anggota TGUPP: kelompok profesional dan mantan tim kampanye
- » Jumlah TGUPP: 73 orang
- » Asal dana: APBD
- » KUA PPAS 2020: Rp 19,8 miliar